

Dampak Penerapan Akuntansi Forensik terhadap Pendeteksian Fraud Pengadaan Barang atau Jasa di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

Muhammad Nabil Fatwa¹, Maulana Ikhrom Ababil², Teguh Adi Priansyah^{3*}

¹⁻³ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

email: mnabil.fatwa@gmail.com¹, maulanaababil03@gmail.com², teguhadipriansyah1@gmail.com³

Article Info :

Received:
10-11-2025
Revised:
15-12-2025
Accepted:
02-01-2026

Abstract

This study examines the impact of forensic accounting implementation on fraud detection in the procurement of goods and services at the East Java Provincial Representative Office of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP). A qualitative case study approach was employed to obtain an in-depth understanding of forensic accounting practices within investigative audits. Data were collected through in-depth interviews with investigative auditors, direct observation of audit processes, and analysis of relevant audit documentation. The findings reveal that forensic accounting contributes significantly to enhancing fraud detection by strengthening investigative audits, utilizing data analytics, conducting comprehensive document reviews, and applying investigative procedures such as interviews and field verification. These practices enable auditors to identify red flags, detect collusive procurement patterns, and substantiate evidence of procurement irregularities more effectively. However, the effectiveness of forensic accounting implementation is constrained by limited forensic-certified human resources, suboptimal use of analytical tools, restricted access to integrated procurement data, and political sensitivity surrounding procurement cases. The study concludes that strengthening auditor competencies, improving analytical infrastructure, and integrating forensic accounting with procurement oversight mechanisms are essential to reinforce fraud detection and promote public sector accountability.

Keywords: Forensic Accounting, Fraud Detection, Procurement, Investigative Audit, Public Sector.

Akstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan akuntansi forensik terhadap pendeteksian fraud dalam pengadaan barang dan jasa di Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik akuntansi forensik dalam pelaksanaan audit investigatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan auditor investigatif, observasi terhadap proses audit, serta telaah dokumentasi penugasan audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi forensik berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas pendeteksian fraud melalui penguatan audit investigatif, pemanfaatan analisis data, pemeriksaan dokumen pengadaan secara komprehensif, serta penerapan prosedur investigatif seperti wawancara dan verifikasi lapangan. Pendekatan ini membantu auditor mengidentifikasi red flags, mendeteksi pola kolusi pengadaan, serta memperkuat pembuktian atas penyimpangan pengadaan. Namun, efektivitas penerapan akuntansi forensik masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia bersertifikasi forensik, pemanfaatan perangkat analitik yang belum optimal, keterbatasan akses data pengadaan terintegrasi, serta sensitivitas politik dalam penanganan kasus pengadaan.

Kata Kunci: Akuntansi Forensik, Fraud, Pengadaan Barang dan Jasa, Audit Investigatif, Sektor Publik.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Praktik pengadaan barang atau jasa pada sektor pemerintahan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap terjadinya kecurangan karena melibatkan anggaran publik, proses administratif yang kompleks, serta banyaknya aktor yang terlibat dalam setiap tahapan kegiatan. Laporan global mengenai kecurangan pekerjaan menunjukkan bahwa sektor publik masih menjadi salah satu area dengan kasus fraud yang signifikan, terutama pada aktivitas pengadaan yang berkaitan langsung dengan penggunaan

dana negara (ACFE, 2022). Kondisi ini menuntut adanya pendekatan pengawasan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menelusuri indikasi kecurangan secara mendalam dan sistematis. Penguatan metode pendeteksian fraud menjadi kebutuhan strategis bagi lembaga pengawasan internal pemerintah agar potensi kerugian negara dapat diminimalkan sejak tahap awal.

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur memiliki peran sentral dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara, khususnya pada aktivitas pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintah daerah. Tugas dan fungsi BPKP mencakup audit, review, evaluasi, serta pengawasan atas pengelolaan keuangan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh entitas pemerintah (BPKP Republik Indonesia, 2021). Karakteristik wilayah Jawa Timur dengan cakupan anggaran yang besar serta jumlah satuan kerja yang luas menghadirkan tantangan tersendiri dalam mendeteksi dan mengungkap praktik kecurangan pengadaan. Profil organisasi dan mandat pengawasan BPKP Jawa Timur menempatkan lembaga ini pada posisi strategis dalam penerapan pendekatan akuntansi forensik untuk mendukung efektivitas pengawasan (Profil Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur).

Akuntansi forensik berkembang sebagai disiplin yang mengintegrasikan akuntansi, audit, serta teknik investigatif untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan membuktikan terjadinya kecurangan. Pendekatan ini menekankan penggunaan bukti keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan relevan dalam proses pembuktian fraud (Arens et al., 2017). Dalam praktik pemerintahan, akuntansi forensik tidak hanya berfungsi sebagai alat pembuktian, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan melalui peningkatan kualitas analisis atas transaksi yang berisiko tinggi. Implementasi akuntansi forensik dipandang mampu memperluas cakupan pendeteksian kecurangan yang tidak terjangkau oleh audit konvensional.

Pengadaan barang atau jasa menjadi fokus utama penerapan akuntansi forensik karena prosesnya melibatkan perencanaan anggaran, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serta pembayaran yang rawan manipulasi. Pedoman audit investigatif menegaskan bahwa pengadaan merupakan area prioritas dalam penugasan investigasi karena sering digunakan sebagai sarana penyalahgunaan kewenangan dan kolusi (BPKP Republik Indonesia, 2020). Pola fraud pengadaan sering kali tersamarkan melalui rekayasa dokumen, mark-up harga, pengaturan pemenang lelang, maupun pembayaran fiktif yang sulit terdeteksi tanpa pendekatan investigatif. Akuntansi forensik memberikan kerangka analitis untuk menelusuri pola-pola tersebut secara komprehensif dan berbasis bukti.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi forensik berkontribusi positif terhadap peningkatan kemampuan pendeteksian fraud di sektor pemerintahan. Studi mengenai penerapan sistem pengendalian internal dan akuntansi forensik membuktikan adanya peningkatan deteksi dini kecurangan ketika teknik forensik digunakan secara terstruktur (Alamsyahbana et al., 2022). Temuan serupa juga diperoleh pada penelitian yang mengkaji peran akuntansi forensik dan audit investigasi dalam mendeteksi fraud pada lingkungan BPKP di daerah lain (Ardiansyah, 2023). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa akuntansi forensik memiliki relevansi praktis yang kuat dalam mendukung fungsi pengawasan internal pemerintah.

Efektivitas akuntansi forensik tidak hanya diukur dari keberhasilannya mengungkap kecurangan, tetapi juga dari efisiensi proses pembuktian dan kualitas rekomendasi yang dihasilkan. Penelitian terkini menunjukkan bahwa pendekatan forensik mampu memperkuat argumentasi audit serta mempercepat proses pengambilan keputusan manajerial dalam penanganan kasus fraud (Cahyadi, 2024). Pada sektor pengadaan, penggunaan teknik forensik membantu auditor mengidentifikasi titik rawan sejak tahap perencanaan hingga realisasi kontrak. Kondisi ini memperkuat posisi akuntansi forensik sebagai instrumen penting dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan publik.

Hubungan antara audit investigatif, akuntansi forensik, dan sistem pengendalian internal juga menjadi faktor penentu keberhasilan pendeteksian kecurangan pengadaan barang atau jasa. Penelitian terbaru menegaskan bahwa kombinasi ketiga unsur tersebut memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kemampuan mendeteksi fraud secara akurat dan berkelanjutan (Cahyaningsih et al., 2025). Peran akuntansi forensik menjadi semakin strategis ketika didukung oleh kerangka pengendalian internal yang kuat dan audit investigatif yang responsif. Integrasi pendekatan ini menciptakan sistem pengawasan yang lebih adaptif terhadap dinamika risiko kecurangan.

Meskipun berbagai studi telah mengkaji akuntansi forensik di sektor pemerintahan, penelitian yang secara spesifik menyoroti dampaknya pada pendeteksian fraud pengadaan di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur masih terbatas. Perbedaan karakteristik organisasi, kompleksitas pengadaan, serta

lingkungan pengawasan daerah menuntut analisis yang kontekstual dan berbasis praktik lapangan. Kajian mengenai peran akuntansi forensik dalam mendeteksi fraud pemerintahan menunjukkan bahwa efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusi dan dukungan kebijakan internal (Erianti et al., 2025). Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris dalam memperkaya literatur serta menjadi rujukan praktis bagi penguatan pengawasan pengadaan barang atau jasa di lingkungan BPKP Provinsi Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik penerapan akuntansi forensik dalam konteks audit investigatif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali secara komprehensif bagaimana akuntansi forensik diterapkan dalam proses pemeriksaan, menelusuri persepsi auditor terhadap efektivitasnya dalam mendeteksi kecurangan, serta memahami dinamika aktual yang dihadapi dalam pendeteksian fraud pengadaan barang atau jasa. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi terbatas, dan telaah dokumen penugasan audit investigatif guna memperoleh gambaran yang utuh dan kontekstual. Analisis data dilakukan secara tematik dengan menekankan keterkaitan antara temuan empiris dan kerangka konseptual akuntansi forensik untuk menghasilkan interpretasi yang valid dan bermakna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Penerapan Akuntansi Forensik terhadap Peningkatan Pendeteksian Fraud Pengadaan Barang atau Jasa

Penerapan akuntansi forensik di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kemampuan pendeteksian fraud pengadaan barang atau jasa, sebagaimana terungkap dari hasil wawancara mendalam dengan auditor investigatif dan hasil observasi selama proses audit berlangsung. Auditor menyampaikan bahwa pendekatan forensik memungkinkan proses pemeriksaan tidak berhenti pada kepatuhan administratif, tetapi menelusuri substansi transaksi dan hubungan antar pihak yang terlibat dalam pengadaan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa fraud pengadaan memiliki karakteristik kompleks yang memerlukan teknik audit yang lebih analitis dan investigatif dibandingkan audit konvensional (Arens et al., 2017). Dokumentasi penugasan audit juga menunjukkan bahwa kasus pengadaan dengan indikasi kolusi lebih mudah teridentifikasi ketika prosedur forensik diterapkan secara sistematis (BPKP Republik Indonesia, 2020).

Audit investigatif menjadi instrumen utama dalam penerapan akuntansi forensik dan terbukti berperan penting dalam mengungkap penyimpangan pengadaan di Jawa Timur. Hasil wawancara menunjukkan bahwa auditor menggunakan audit investigatif untuk mengurai rangkaian transaksi pengadaan mulai dari perencanaan anggaran hingga pembayaran, sehingga potensi rekayasa dapat diidentifikasi secara menyeluruh. Pendekatan ini sejalan dengan pedoman resmi audit investigatif yang menempatkan pengadaan barang atau jasa sebagai area berisiko tinggi terhadap fraud (BPKP Republik Indonesia, 2020). Praktik tersebut juga konsisten dengan temuan empiris yang menyatakan bahwa audit investigatif memperkuat efektivitas pendeteksian kecurangan di sektor pemerintahan (Ardiansyah, 2023).

Pemanfaatan analytic tools seperti Excel advanced, pemantauan e-procurement, dan analisis pola transaksi menjadi elemen penting dalam praktik akuntansi forensik yang diamati di lapangan. Auditor menyatakan bahwa teknik analisis data membantu mengungkap pola yang tidak terlihat secara kasat mata, terutama dalam mendeteksi kemiripan penawaran, pengulangan pemenang tender, dan pola harga yang tidak wajar. Hasil observasi menunjukkan bahwa forensic analytics digunakan untuk mengidentifikasi outlier dan anomali transaksi yang menjadi indikator awal kecurangan pengadaan. Temuan ini mendukung laporan global yang menyebutkan bahwa penggunaan data analytics meningkatkan akurasi deteksi fraud secara signifikan (ACFE, 2022).

Pemeriksaan dokumen pengadaan melalui document review menjadi tahapan krusial dalam penerapan akuntansi forensik di BPKP Jawa Timur. Auditor menelusuri keaslian, kelengkapan, serta kesesuaian dokumen kontrak, berita acara, dan bukti pembayaran untuk memastikan tidak terdapat manipulasi administratif. Berdasarkan dokumentasi audit, banyak kasus fraud pengadaan terindikasi melalui ketidaksesuaian antara dokumen kontrak dan kondisi fisik di lapangan. Praktik ini menegaskan

peran akuntansi forensik dalam memperkuat pembuktian kecurangan melalui pendekatan berbasis bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (Cahyadi, 2024).

Penggunaan prosedur investigatif seperti wawancara pihak terkait, konfirmasi vendor, dan pembuktian fisik di lapangan memperkuat efektivitas penerapan akuntansi forensik dalam pendeteksian fraud. Auditor mengungkapkan bahwa kombinasi pemeriksaan dokumen dan investigasi lapangan membantu mengungkap rekayasa volume pekerjaan serta kualitas barang yang tidak sesuai kontrak. Observasi menunjukkan bahwa prosedur ini sering digunakan untuk mengonfirmasi indikasi fraud yang muncul dari hasil analisis data. Pendekatan tersebut mencerminkan karakter utama akuntansi forensik yang menekankan integrasi teknik akuntansi dan investigasi (Erianti et al., 2025).

Kerja sama tim antara auditor investigatif, analis data, dan koordinator pengawasan menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerapan akuntansi forensik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sinergi lintas fungsi mempercepat proses analisis dan memperkaya sudut pandang dalam menilai indikasi fraud pengadaan. Dokumentasi penugasan audit memperlihatkan bahwa temuan yang kompleks lebih mudah diurai ketika melibatkan keahlian multidisipliner. Pola kerja ini sejalan dengan praktik terbaik pengawasan internal yang menekankan kolaborasi sebagai kunci efektivitas pengendalian fraud (BPKP Republik Indonesia, 2021).

Penerapan akuntansi forensik juga berdampak pada peningkatan ketajaman auditor dalam mengenali red flags pengadaan sejak tahap awal pemeriksaan. Auditor menyampaikan bahwa pengalaman menggunakan pendekatan forensik membuat mereka lebih sensitif terhadap indikasi kolusi, pengaturan tender, dan mark-up harga. Observasi lapangan menunjukkan bahwa auditor mampu memfokuskan pemeriksaan pada area berisiko tinggi tanpa harus memperluas ruang lingkup audit secara berlebihan. Temuan ini mendukung penelitian yang menyatakan bahwa akuntansi forensik berperan penting dalam deteksi dini kecurangan (Alamsyahbana et al., 2022).

Efektivitas penerapan akuntansi forensik juga tercermin dari percepatan proses identifikasi penyimpangan tender yang disampaikan oleh informan penelitian. Auditor menjelaskan bahwa forensic approach membantu memperpendek waktu analisis karena fokus pada pola dan bukti yang relevan. Dokumentasi audit menunjukkan bahwa kasus dengan indikasi kuat dapat segera ditindaklanjuti melalui rekomendasi investigatif. Kondisi ini menguatkan temuan bahwa akuntansi forensik meningkatkan efisiensi dan kualitas pembuktian fraud pengadaan (Cahyaningsih et al., 2025).

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan akuntansi forensik tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kualitas pengawasan pengadaan secara keseluruhan. Auditor menilai bahwa pendekatan forensik mendorong proses audit menjadi lebih kritis, analitis, dan berbasis risiko. Observasi terhadap praktik pengawasan menunjukkan adanya pergeseran dari sekadar pemeriksaan formal menuju evaluasi substansial atas proses pengadaan. Pandangan ini sejalan dengan teori audit modern yang menekankan pentingnya pendekatan berbasis risiko dan investigasi dalam sektor publik (Arens et al., 2017).

Secara keseluruhan, dampak penerapan akuntansi forensik di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tercermin pada meningkatnya kemampuan pendeteksian fraud pengadaan melalui integrasi audit investigatif, analisis data, pemeriksaan dokumen, dan investigasi lapangan. Temuan lapangan mengindikasikan bahwa pendekatan ini memperkuat posisi BPKP sebagai aparat pengawasan internal pemerintah yang adaptif terhadap risiko kecurangan. Dokumentasi organisasi dan profil kelembagaan BPKP Jawa Timur menunjukkan dukungan struktural terhadap penerapan praktik forensik dalam pengawasan pengadaan (BPKP Profil Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur). Hasil ini menegaskan relevansi akuntansi forensik sebagai instrumen strategis dalam menjaga akuntabilitas dan integritas pengelolaan keuangan negara (ACFE, 2022).

Faktor Penghambat dan Strategi Penguatan Penerapan Akuntansi Forensik dalam Pendeteksian Fraud Pengadaan Barang atau Jasa

Penerapan akuntansi forensik di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih dihadapkan pada sejumlah faktor penghambat yang bersifat struktural dan operasional. Hasil wawancara dengan auditor investigatif menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan sertifikasi forensik menjadi kendala utama dalam pelaksanaan audit berbasis forensik secara menyeluruh. Observasi lapangan memperlihatkan bahwa tidak semua auditor terlibat aktif dalam proses forensic analytics karena perbedaan latar belakang keahlian teknis. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyebutkan bahwa efektivitas

akuntansi forensik sangat bergantung pada kapasitas dan kompetensi auditor pelaksanaanya (Alamsyahbana et al., 2022).

Keterbatasan jumlah auditor yang memiliki pelatihan khusus akuntansi forensik berdampak pada pembagian tugas audit investigatif yang belum merata. Auditor menyampaikan bahwa beban kerja sering terkonsentrasi pada individu tertentu yang memiliki kemampuan analitis dan investigatif lebih tinggi. Dokumentasi penugasan audit menunjukkan adanya ketergantungan pada auditor senior dalam menangani kasus pengadaan yang kompleks. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan prasyarat utama keberhasilan penerapan akuntansi forensik di sektor pemerintahan (Erianti et al., 2025).

Hambatan lain yang teridentifikasi adalah keterbatasan pemanfaatan perangkat lunak dan tools analitik yang mendukung forensic analytics. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa sebagian besar analisis data masih dilakukan secara manual menggunakan spreadsheet, sehingga proses identifikasi pola fraud membutuhkan waktu yang lebih lama. Observasi menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur teknologi mempengaruhi kedalaman analisis terhadap data pengadaan yang berskala besar. Kondisi ini konsisten dengan laporan internasional yang menegaskan pentingnya dukungan teknologi dalam meningkatkan efektivitas deteksi fraud (ACFE, 2022).

Akses terhadap data pengadaan yang belum terintegrasi juga menjadi faktor penghambat dalam penerapan akuntansi forensik. Auditor menyampaikan bahwa data dari sistem SPSE atau LPSE tidak selalu tersedia secara lengkap dan tepat waktu untuk kebutuhan audit investigatif. Dokumentasi pemeriksaan menunjukkan bahwa keterbatasan akses data sering menghambat proses penelusuran hubungan antar vendor dan histori transaksi pengadaan. Hambatan ini sejalan dengan kajian yang menyatakan bahwa integrasi data merupakan elemen krusial dalam mendukung audit forensik berbasis risiko (Cahyaningsih et al., 2025).

Sensitivitas politik pada kasus pengadaan barang atau jasa turut mempengaruhi ruang gerak auditor dalam menerapkan pendekatan forensik secara optimal. Hasil wawancara mengindikasikan bahwa auditor sering menghadapi tekanan non-teknis ketika menangani kasus yang melibatkan kepentingan strategis atau aktor berpengaruh. Observasi terhadap dinamika pemeriksaan menunjukkan bahwa faktor eksternal dapat mempengaruhi kecepatan dan kedalaman investigasi. Temuan ini memperkuat argumen bahwa fraud pengadaan di sektor publik memiliki dimensi politik yang memerlukan kehati-hatian dan dukungan kelembagaan yang kuat (Ardiansyah, 2023).

Meskipun menghadapi berbagai kendala, terdapat faktor pendukung yang memperkuat penerapan akuntansi forensik di BPKP Jawa Timur. Auditor menilai bahwa keberadaan standar operasional prosedur audit investigatif memberikan kerangka kerja yang jelas dalam melaksanakan pemeriksaan forensik. Dokumentasi resmi menunjukkan bahwa SOP tersebut menjadi acuan utama dalam menentukan tahapan, teknik, dan metode pembuktian fraud. Kejelasan prosedur ini sejalan dengan pedoman audit investigatif yang menekankan pentingnya standar dalam menjaga konsistensi dan kualitas audit (BPKP Republik Indonesia, 2020).

Kolaborasi antar auditor dan unit pengawasan menjadi faktor pendukung lain yang memperkuat efektivitas akuntansi forensik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kerja tim memungkinkan pertukaran informasi dan sudut pandang yang memperkaya analisis fraud pengadaan. Observasi lapangan memperlihatkan bahwa sinergi antara auditor investigatif dan analis data meningkatkan kecepatan pengungkapan indikasi kecurangan. Pola kerja kolaboratif ini sejalan dengan prinsip pengawasan internal yang menekankan kerja lintas fungsi dalam menghadapi risiko kompleks (BPKP Republik Indonesia, 2021).

Keberadaan mekanisme whistleblowing system juga berperan sebagai sumber informasi awal dalam pendeteksian fraud pengadaan. Auditor mengungkapkan bahwa laporan dari whistleblower sering menjadi pemicu dilakukannya audit investigatif berbasis forensik. Dokumentasi penugasan menunjukkan bahwa informasi awal tersebut kemudian diverifikasi melalui analisis data dan pemeriksaan lapangan. Peran whistleblowing sebagai early warning system telah diakui secara luas dalam literatur pengendalian fraud sektor publik (ACFE, 2022).

Strategi penguatan penerapan akuntansi forensik diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan optimalisasi pemanfaatan teknologi analitik. Auditor menyampaikan perlunya pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi forensik untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan investigatif. Observasi menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan teknis auditor berbanding lurus dengan kualitas temuan dan rekomendasi audit. Pandangan ini sejalan dengan penelitian yang menekankan

bahwa investasi pada kompetensi auditor meningkatkan efektivitas deteksi dan pembuktian fraud (Cahyadi, 2024).

Integrasi akuntansi forensik dengan audit kepatuhan, audit kinerja, dan evaluasi risiko pengadaan menjadi strategi penting dalam memperkuat sistem pengawasan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pendekatan terpadu membantu auditor memahami fraud tidak hanya sebagai pelanggaran aturan, tetapi juga sebagai kegagalan tata kelola. Dokumentasi kebijakan internal memperlihatkan adanya upaya sinergi antara pengawasan internal dan penegakan akuntabilitas. Pendekatan ini selaras dengan teori risk-based auditing yang menempatkan akuntansi forensik sebagai elemen kunci dalam pengawasan pengadaan sektor publik (Arens et al., 2017; BPKP Profil Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi forensik di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendeteksian fraud pengadaan barang atau jasa melalui penggunaan audit investigatif, analisis data, pemeriksaan dokumen, serta prosedur investigatif yang terintegrasi. Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengindikasikan bahwa pendekatan forensik mampu meningkatkan ketajaman auditor dalam mengidentifikasi red flags, mengungkap pola kolusi vendor, serta memvalidasi bukti penyimpangan pengadaan secara lebih komprehensif. Meskipun demikian, efektivitas penerapan akuntansi forensik masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia bersertifikasi forensik, pemanfaatan teknologi analitik yang belum optimal, keterbatasan akses data pengadaan, serta sensitivitas politik dalam penanganan kasus tertentu. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan kompetensi auditor, dukungan infrastruktur teknologi, dan integrasi akuntansi forensik dengan sistem pengawasan pengadaan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan akuntabilitas dan integritas pengelolaan keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Acfe. (2022). *Report To The Nations: Global Study On Occupational Fraud And Abuse*. Association Of Certified Fraud Examiners.
- Alamsyahbana, M. I., Zulfachri, B., Zulaika, N., Sitepu, A. P., & Munaf, T. (2022). Analisis Penerapan Spi Dan Akuntansi Forensik Dalam Upaya Pendeteksian Fraud Secara Dini. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(2), 1343-1356. <http://Dx.Doi.Org/10.37905/Aksara.8.2.1343-1356.2022>
- Aradiansyah, S. S. (2023). Pengaruh Whistleblowing, Akuntansi Forensik Dan Audit Investigasi Dalam Mendeteksi Fraud (Studi Pada Perwakilan Bpkp Provinsi Riau. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 19(2), 106-120. <https://doi.org/10.37301/Jkaa.V19i2.111>
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2017). *Auditing And Assurance Services: An Integrated Approach* (16th Ed.). Pearson.
- Bpkp. Profil Perwakilan Bpkp Provinsi Jawa Timur Dan Dokumen Informasi Publik.
- Bpkp Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Audit Investigatif*. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.
- Bpkp Republik Indonesia. (2021). *Laporan Kinerja Bpkp*. Bpkp.
- Cahyadi, R. U. (2024). Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Dari Akuntansi Forensik Dan Audit Investigasi Terhadap Pembuktian Kecurangan. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 19(2), 309-319.
- Cahyaningsih, C., Putrie, V. S., & Farida, A. L. (2025). Pengaruh Audit Investigatif, Akuntansi Forensik, Dan Sistem Pengendalian Internal Dalam Mendeteksi Kecurangan Pengadaan Barang Dan Jasa. *Indonesian Journal Of Auditing And Accounting*, 2(1), 28-44. <https://doi.org/10.71188/Ijaa.V2i1.97>
- Erianti, D., Hidayah, N., & Syarah, S. (2025). Peran Akuntansi Forensik Dalam Mendeteksi Fraud Pada Sektor Pemerintahan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 2757-2769. <https://doi.org/10.31004/Innovative.V5i2.18490>
- Junaidi, J. (2024/2025). *Fraud Detection In Public Sector Institutions / Integrated Strategy For Detecting Fraud In The Digital Era*.
- Khatimah, H., Junaid, A., & Alam, S. (2024). Pengaruh Akuntansi Forensik Dan Audit Investigasi Terhadap Pengungkapan Fraud: Studi Pada Kantor Bpkp Sulawesi Selatan. *Center Of Economic Students Journal*, 7(4), 261-269. <https://doi.org/10.56750/Csej.V7i4.1023>

- Peraturan/Laporan Terkait Pedoman Pengadaan Dan Pencegahan Korupsi (Peraturan Lkpp No.1/2020; Surat Edaran Kepala Lkpp No.5/2024).
- Lkpp Republik Indonesia. (2022). *Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Spse) Manual Book*. Lkpp.
- Rani, A. S., Maharani, R. A., & Machdar, N. M. (2024). Dampak Penerapan Akuntansi Forensik Dan Audit Investigasi Serta Mengevaluasi Proses Pengungkapan Tindak Pidana Fraud Pengadaan Barang/Jasa. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(3), 187-194. <https://doi.org/10.30640/Inisiatif.V3i3.2646>
- ResearchgateKajian/Tesis: *Menelaah Dampak Penerapan Akuntansi Forensik Dalam Mendeteksi Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada Sektor Publik* (Various Authors).
- Sidauruk, D. L. (2024). *Data Analytics In Fraud Prevention And Detection* (Apf Journal).
- Studi Kasus/Tesis: *Pengaruh Audit Investigatif, Akuntansi Forensik, Dan Sistem Pengendalian Internal Dalam Mendeteksi Kecurangan Pengadaan Barang Dan Jasa: Studi Kasus Pada Perwakilan Bpkp Provinsi Dki Jakarta*. (Repository Telkom University). ([Repository.Telkomuniversity.Ac.Id](https://repository.telkomuniversity.ac.id))
- Suhartono, S., & Jannah, R. (2021). Menelaah Dampak Penerapan Akuntansi Forensik Dalam Mendeteksi Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi Stie Muhammadiyah Palopo*, 7(2). <http://dx.doi.org/10.35906/Ja001.V7i2.735>
- Wiharti, R. R. (2020). *Dampak Penerapan Akuntansi Forensik Dan Audit Investigasi Dalam Mendeteksi Fraud*. Jurnal (Ejournal.Undiksha).